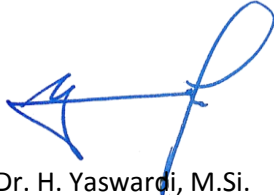




RENCANA STRATEGIS

**LPMP Sumatera Selatan
Tahun 2015 - 2019**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh	Diverifikasi oleh	Divalidasi oleh
Ketua Tim	Kasubbag Umum	Kepala LPMP
 Bastudin, M.Pd. NIP 197308172001121005	 Rudi Syaifullah, S.Si, M.M. NIP 197606272003121002	 Dr. H. Yaswardi, M.Si. NIP 196312151987031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat, hidayah dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyusun, mereviu dan mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) LPMP Sumatera Selatan Periode Tahun 2015 – 2019 ini secara baik dan lancar. Naskah Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya untuk memantapkan sistem pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan program-program strategik lembaga sehingga program-program strategik tersebut dapat diimplementasikan sesuai rencana. Selain itu, naskah ini juga disusun sebagai upaya lembaga untuk menselaraskan program-program LPMP Sumatera Selatan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan keselarasan ini diharapkan program-program yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan di daerah akan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai sasaran.

Atas selesainya penyusunan dan pengembangan Rencana Strategis ini, maka kami ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat secara aktif dalam reviu naskah renstra ini, baik yang berasal internal maupun eksternal lembaga. Semoga keterlibatan semua pihak-pihak ini akan memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan YME. Amin.

Indralaya, 9 Februari 2016

Kepala LPMP Sumatera Selatan



Dr. H. Yaswardi, M.Si
NIP 19631215 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Paradigma Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah	5
D. Kondisi Umum.....	8
E. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SUMATERA SELATAN	20
A. Visi dan Misi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	20
B. Tujuan Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	22
C. Sasaran Strategis LPMP Sumatera Selatan tahun 2015 – 2019	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
A. Kebijakan dan Strategi LPMP Sumatera Selatan	28
B. Kerangka Regulasi.....	33
C. Kerangka Kelembagaan.....	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
A. Target Kinerja	34
B. Kerangka Pendanaan	38
BAB V P E N U T U P.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 APS Pendidikan Dasar Tahun 2013.....	9
Gambar 2 Rata-Rata Lama Sekolah dan AMH Tahun 2019 - 2013	10

DAFTAR TABEL

Table 1 Misi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019	21
Table 2 Tujuan Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	22
Table 3 Sasaran Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019.....	24
Table 4 Tujuan, Sasaran Strategis, IKK	24
Table 5. Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sumatera Selatan	28
Table 6 Sasaran, Program dan IKK Penjaminan Mutu Pendidikan	30
Table 7 Target Penguatan Dukungan Penjaminan Mutu Pendidikan	35
Table 8 Target Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2015 - 2019	35
Table 9 Target Peningkatan Indeks Efektivitas Sekolah Tahun 2015 – 2019	36
Table 10 Target Satuan Pendidikan Yang Disupervisi dan Difasilitasi.....	36
Table 11 Target Tata Kelola LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 28c dan pasal 31 UUD 1945. Pada pasal 28c UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, pasal 31 menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian konstitusi memberikan landasan yang kuat sebagai dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun visi, misi maupun program-program yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 yang bertujuan untuk mewujudkan 1) masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, dan 2) bangsa yang berdaya saing.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program-Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019 menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggungjawab terhadap pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban mewujudkan pencapaian target kinerja unit utamanya. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2015, lembaga ini mengemban tugas sebagai pelaksana penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan difokuskan pada satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan/program pendidikan.

Saling keterkaitan dan kompleksnya hubungan antara unit yang satu dengan lainnya membutuhkan rincian yang jelas tentang tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 merupakan ketentuan umum yang masih memerlukan penjelasan lebih rinci yang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing unit pelaksana penjaminan mutu. Untuk itu, diperlukan pedoman

pelaksanaan yang menggambarkan mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Sehubungan dengan itu, LPMP perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyusunan Renstra LPMP Sumatera Selatan memperhatikan prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan yang termuat dalam Renstra Kementerian Pendidikan Tahun 2015-2019 dan Kebudayaan serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan LPMP Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud. Renstra LPMP Sumatera Selatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang mengakomodasi semua kepentingan berbagai pihak serta dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai peruntukannya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program penjaminan mutu pendidikan.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
15. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis K/L) 2015—2019;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

C. Paradigma Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan disusun berdasarkan paradigma Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015—2019 yang bersifat universal-nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia dan kondisi provinsi Sumatera Selatan serta dipilih dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dan dunia internasional.

1. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan untuk semua merupakan isu internasional sekaligus menjadi perhatian pemerintah. "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap warga negara dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara integratif, konsisten, terukur dan mendapat dukungan masyarakat secara umum.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pembelajaran Abad ke-21

Pendidikan harus memberikan prioritas pada pengembangan keterampilan-keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk hidup di abad ke-21. Wagner (2001) dan Kelompok Kepemimpinan Perubahan di Universitas Harvard (*The Change Leadership Group at Harvard University*) mengidentifikasi serangkaian kompetensi dan keterampilan untuk abad ke-21. Diinformasikan melalui beberapa ratus interviu dengan pemimpin di bidang pendidikan dan bisnis *non-profit*, Wagner menekankan bahwa peserta didik membutuhkan tujuh keterampilan hidup agar siap menghadapi kehidupan, pekerjaan dan masyarakat abad ke-21, yaitu

- Berpikir kritis dan memecahkan masalah

- Kolaborasi dan kepemimpinan
- Ketangkasan dan kemampuan beradaptasi
- Inisiatif dan kewirausahaan
- Komunikasi lisan dan tulisan yang efektif
- Mengakses dan menganalisis informasi
- Keingintahuan dan imajenasi

The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) telah mengidentifikasi pengembangan kompetensi abad ke-21 diantara pemuda sebagai sebuah keperdulian/perhatian internasional yang mendesak. Kompetensi tersebut didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang penting untuk kompetitif di abad ke-21. Anggota APEC mendefinisikan empat kompetensi abad ke-21 yang harus diintegrasikan kedalam sistem pendidikan yang ada - *belajar sepanjang hayat, pemecahan masalah, manajemen diri dan kerjasama kelompok* (APEC, 2008).

Terdapat kesepakatan umum bahwa penguasaan mata pelajaran inti dan belajar seputar tema abad ke-21 adalah penting bagi peserta didik dewasa ini. Mata pelajaran inti yang teridentifikasi meliputi Tata Bahasa, Membaca atau Seni Bahasa, Bahasa Dunia, Seni, Matematika, Sain, Giografi, Sejarah, Pemerintah dan Kewarganeraan, dengan keseimbangan antara pendidikan teknis dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan budaya dan kemanusiaan (Davies, Fidler and Gorbis, 2011; Gardner, 2008; P21, 2007a, 2007b; Salas-Pilco, 2013).

Disamping itu, teoritikus pendidikan dan organisasi menekankan bahwa sekolah harus menjadikan tema-tema antar ilmu pengetahuan abad ke 21 menjadi mata pelajaran inti. Ada empat tema dengan relevansi tertentu untuk kehidupan moderan, yaitu kesadaran global, literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan kewirausahaan.

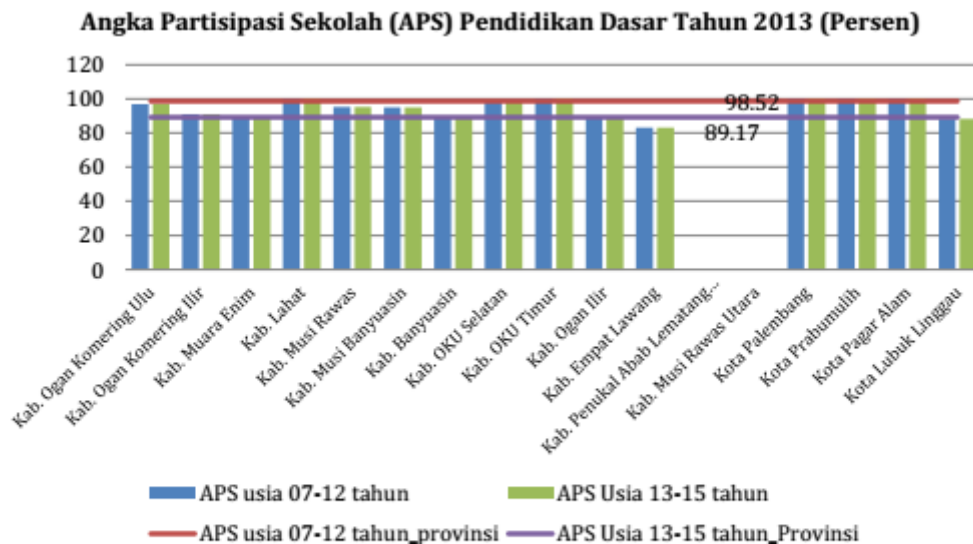
D. Kondisi Umum

Rencana Strategis LPMP Sumatera Selatan tahun 2015-2019 tidak terlepas dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah periode 2015-2019, yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran strategis kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK) serta output Rencana Strategis LPMP Sumatera Selatan 2015-2019. Disamping itu, Renstra LPMP Sumatera Selatan disusun dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Selatan memiliki peran penting, pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya. Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Sumatera Selatan semakin meningkat setiap tahunnya. Tingkat pemanfaatan fasilitas penduduk usia sekolah dapat diukur dari persentase penduduk yang bersekolah pada umur tertentu atau disebut Angka Partisipasi Kasar (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antar kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tidak merata (Gambar 1). Rata-rata APS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar 98,52 persen untuk usia 7-12 tahun dan 89,17% untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan APS terendah meliputi

Kabupaten Empat lawang, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Muara Enim. APS cenderung menurun sejalan dengan peningkatan umur penduduk. APS usia SD lebih tinggi daripada usia SLTP, demikian seterusnya yang menunjukkan keterbatasan penduduk pada jenjang yang lebih tinggi. APS mampu menggambarkan tingkat partisipasi atau akses pendidikan

sesuai kelompok usia sekolah namun tidak dapat digunakan untuk melihat pada jenjang apa seseorang menikmati pendidikan.

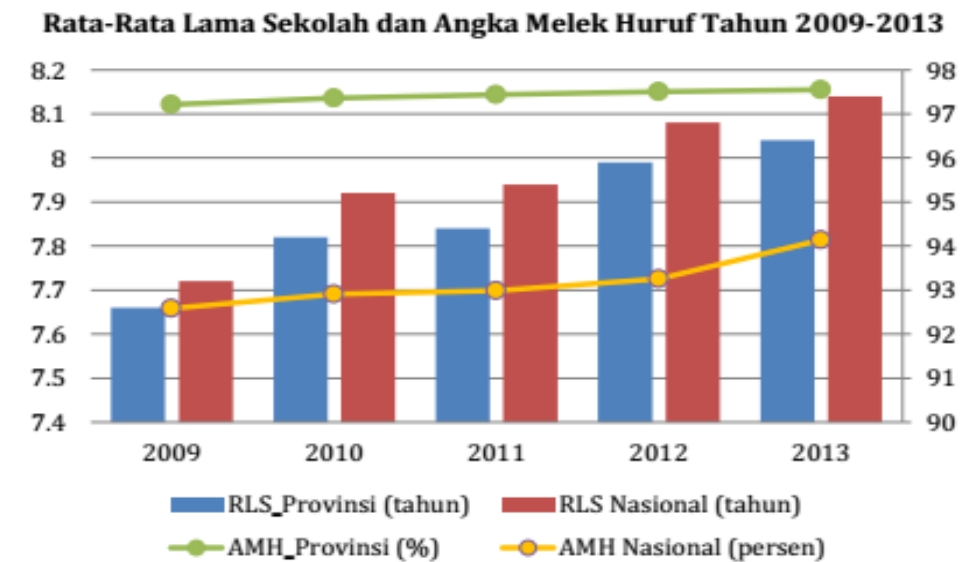


Sumber: BPS, 2013

Gambar 1 APS Pendidikan Dasar Tahun 2013

Capaian APS pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdampak pada rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. RLS di Provinsi Sumatera Selatan 8,04 tahun, lebih rendah dari RLS nasional 8,14 tahun. AMH Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2013 berkisar pada angka 97,21 persen – 97,55% dan tidak banyak peningkatannya, lebih tinggi daripada AMH nasional yang terus meningkat dari 91 % di tahun 2009 menjadi 94 persen di tahun 2013 (Gambar 2). RLS penduduk laki-laki relatif lebih tinggi daripada perempuan namun perbedaan keduanya semakin berkurang. Secara umum tingkat pendidikan penduduk yang rendah terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Ogan Ilir dan Banyuasin, sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi terdapat di Kota Palembang, Prabumulih dan Lubuklinggau. Permasalahan pendidikan di Sumatera Selatan salah satunya adalah distribusi guru yang masih terkonsentrasi di kota.

Keberadaan guru secara jumlah cukup namun distribusinya belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.



Gambar 2 Rata-Rata Lama Sekolah dan AMH Tahun 2019 - 2013

Provinsi Sumatera Selatan perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai.

E. Potensi dan Permasalahan

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang cukup luas memiliki potensi yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlu dilakukan analisis terhadap potensi yang ada. Tentu juga disamping adanya potensi, tidak dapat dipungkiri adanya tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 dan Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian adalah:

1. Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. *Tren Pertumbuhan Ekonomi*

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010—2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing. Sebagai contoh, *McKinsey Global Institute* pada tahun 2012, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.

b. *Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional*

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index* (GCI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009—2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013—2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori

efficiency driven economy menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index* (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan selalu lebih tinggi di atas nilai IPM nasional. Pada tahun 2012 mencapai 73,99 lebih tinggi dari nilai IPM nasional 73,29. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Selatan secara rata-rata nasional lebih baik. Dengan membandingkan nilai IPM provinsi lainnya nilai IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah. Nilai IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi belum termasuk peringkat tinggi. Peningkatan nilai IPM ditentukan oleh perbaikan nilai komponen pembentuk IPM. Angka Harapan Hidup meningkat dari 67,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,80 tahun pada tahun 2011 menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebagai gambaran perbaikan derajat pendidikan masyarakat. Daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga meningkat sebagai wujud perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

c. *Perkembangan Demografi di Sumatera Selatan*

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan

telah menurun dan melewati batas di bawah 50 % pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 % antara tahun 2028—2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 % dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia. Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 7.222.635 jiwa sehingga tercatat sebagai peringkat kesembilan dari seluruh provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 adalah 7.450.394 jiwa atau meningkat 3,15 persen dari tahun 2009. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat 2,93 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 3,97 juta jiwa pada tahun 1980, 5,49 juta jiwa pada tahun 1990, 6,27 juta jiwa pada tahun 2000, serta 7,22 juta jiwa pada tahun 2009.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan

melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran. Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan kondisi yang terjadi secara umum, dimana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

d. *Spektrum Tenaga Kerja*

Sebagai catatan pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai catatan, ASEAN akan menerapkan *ASEAN economic community* atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai “pasar terbesar dan basis produksi” paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Agustus 2012 mencapai 3.746.373 orang, berkurang sekitar 24.300 orang dibandingkan Agustus 2011 sebesar 3.770.673 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi

Sumatera Selatan pada Agustus 2012 mencapai 3.532.932 orang, berkurang sekitar 20.172 orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2011 yang sebesar 3.553.104 orang. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

e. *Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat*

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negative lainnyayang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

f. *Kondisi Jati Diri Bangsa*

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan

bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan

Melihat perencanaan program dan keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah sampai tahun 2014 (Renstra Tahun 2010-2014) menunjukkan prestasi yang baik. Dari segi pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan, Kemdikbud memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun masih terdapat permasalahan penting dan tantangan yang harus dihadapi pada periode 2015—2019. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

a. *Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal*

Meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya, namun sebagian yang lain masih perlu

upaya penguatan peran dan keterlibatan di dalam meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan. Peran orang tua dalam mendukung kemajuan pendidikan anak masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja. Satuan pendidikan hendaknya menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang baik. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

b. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

Wajib belajar pendidikan 12 tahun bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia usia s.d 21 tahun. Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan, seperti masih ada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah yang belum mendapat pelayanan pendidikan, masih ada anak-anak yang mengalami putus sekolah. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

c. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal

Masih ada permasalahan pendidikan di Sumatera Selatan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di semua jenjang pendidikan di

Sumatera Selatan bergerak fluktuatif, namun telah menuju ke arah yang lebih baik. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 menunjukkan persentase 113,13%, meningkat menjadi 115,75% pada tahun 2009 dan menurun menjadi 113,75% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 103,84. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 106,09. Artinya dari tahun 2008-2012 pada umumnya masih terdapat siswa di Sumatera Selatan yang bersekolah di SD yang usianya di atas usia sekolah SD (di atas 7-12)

Untuk APK tingkat SMP selama periode 2009-2012 pada umumnya menunjukkan trend meningkat, hanya pada tahun 2009 dan 2012 yang mengalami penurunan. Artinya pada tingkat SMP, masih banyak anak usia sekolah SMP tapi tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Sementara untuk tingkat SMA menunjukkan trend meningkat selama periode 2008-2013, kecuali pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia SMA banyak yang tidak melanjutkan sekolah.

Sementara itu Angka Partisipasi Murni yang merupakan proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya untuk semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan cenderung fluktuatif. APM SD/MI dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, dari 92,97 pada tahun 2008 menjadi 92,67 pada tahun 2012. APM SMP/MTs mengalami penurunan dari 65,07 pada tahun 2008 menjadi 67,75 pada tahun 2012. Sementara untuk tingkat SMA selama periode tersebut menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa dari semua tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih banyak anak sekolah yang tidak tepat waktunya.

d. Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK

SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantung-kantung putus sekolah belum tersentuh atau terlayani secara baik. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antara kemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala. Di Sumatera Selatan Angka Putus Sekolah pada semua tingkat pendidikan terlihat angka yang fluktuatif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab angka putus sekolah, antara lain daerah perairan sebagai dampak dari kesulitan transportasi, pemerataan prasarana sekolah, dan usia pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor lainnya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SUMATERA SELATAN

A. Visi dan Misi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 dikembangkan berdasarkan visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud yang mengangkat visi berupa *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”*, sedangkan misi LPMP Sumatera Selatan dikembangkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi LPMP sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015.

Selain visi dan misi, LPMP Sumatera Selatan juga memiliki motto penyemangat untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh konsumen dan para pemangku kepentingan. Motto LPMP Sumatera Selatan ini dikembangkan berdasarkan semangat dan cita-cita seluruh pegawai LPMP Sumatera Selatan yang berkomitmen dan berkeinginan untuk meningkatkan kualitas layanan prima kepada seluruh konsumen dan para pemangku kepentingan, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan acuan diatas, maka LPMP Sumatera Selatan memiliki visi, misi, motto dan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Visi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong di Provinsi Sumatera Selatan.”

2. Misi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Untuk mewujudkan visi di atas, LPMP Sumatera Selatan menetapkan misi sebagai berikut, yakni:

Table 1 Misi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Kuat
M2	Meningkatkan Standar Mutu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
M3	Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

3. Motto LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Untuk mengawal dan menyemangati pencapaian visi dan misi di atas, LPMP Sumatera Selatan menetapkan motto yakni “*Melayani dengan amanah*”.

4. Nilai-nilai utama LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Nilai-nilai yang dikembangkan LPMP Sumatera Selatan adalah *Religius, Profesional, Bertanggung Jawab*.

1. Religius

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan toleran terhadap penganut agama lain dan mampu hidup dengan rukun. Karakter religious sangat penting bagi kehidupan seseorang dan menjadi menjadi sikap hidup dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Selatan.

2. Profesional

Profesional bersangkutan dengan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional adalah suatu tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal.

3. Bertanggungjawab

Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan siap menanggung segala sesuatu yang muncul sebagai akibat dilakukannya suatu aktivitas tertentu.

B. Tujuan Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

Tujuan strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas LPMP berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Table 2 Tujuan Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Penguatan Peran Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
T.2	Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
T.3	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Tujuan strategis ini untuk memenuhi hak dasar WNI, tanpa memandang status sosial ekonomi dan budaya, ras, etnik, agama, gender, ataupun faktor geografis, serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar tercapai kesejahteraan yang adil dan merata. Penjabaran tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

a. *Penguatan Peran pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*

Penguatan peran penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini bertujuan menciptakan posisi SDM Pendidikan sebagai subyek pengelola

pendidikan. Melibatkan stakeholders pendidikan secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

b. Peningkatan Standar Mutu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan SNP

Seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK ditargetkan dapat dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk mengukur pemenuhan mutu SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya satuan pendidikan yang mutunya belum mencapai SNP perlu ditingkatkan melalui kegiatan supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu terhadap satuan pendidikan yang telah dipetakan mutunya.

c. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja LPMP sebagai UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud diharapkan dapat menopang Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja unit utama Kemdikbud untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah, terutama satuan pendidikan dalam pendidikan akan dicapai melalui peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan pada satuan pendidikan. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan setiap tahunnya semakin meningkat dalam rangka pemenuhan SNP.

C. Sasaran Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2019

Sasaran strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2019 dirumuskan berdasarkan tujuan strategis LPMP Sumatera Selatan diatas sebagai berikut:

Table 3 Sasaran Strategis LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

Kode	Sasaran Strategis Kegiatan
SSK 1	1. Meningkatnya sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Selatan.
SSK 2	2. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan.
SSK 3	3. Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan.”

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis, sasaran strategis kegiatandan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Melalui tabel tersebut terlihat jenis IKK sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Table 4 Tujuan, Sasaran Strategis, IKK
LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penguatan Peran Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan	Meningkatnya sikap positif pelaku penjaminan mutu	Pelaku Pendidikan berperan aktif dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Dasar dan Menengah	pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan berkategori “Baik”
2	Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SD yang meningkat Indeks efektifitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMP yang meningkat Indeks efektifitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMA yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMA yang meningkat Indeks efektifitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMK yang meningkat Indeks efektifitas berdasarkan

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			SNP sebesar 95 %
			Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
4	Peningkatan Sistem Tata Kelola Lembaga yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia yang professional;
			Tersedianya sistem manajemen mutu yang kuat berstandar ISO;
			Terlaksananya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
			Tersedianya sarana dan prasarana lembaga yang handal;
			Terjalinnya kemitraan dengan “stakeholders”
			Terlaksananya layanan dukungan manajemen lembaga

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Tersedianya administrasi pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
			Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan
			Tersedianya Data Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan yang akurat dan terbaru;
			Tersedianya Profil Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
			Tercapainya nilai LAKIP LPMP Sumatera Selatan sebesar 80;
			Terlaksananya koordinasi dengan unit utama dan pemerintah daerah

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Kebijakan dan Strategi LPMP Sumatera Selatan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Renstra Ditjen Dikdasmen tahun 2015 – 2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan 2015—2019. LPMP Sumatera Selatan perlu menyusun prioritas dan program kegiatan bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada program prioritas Ditjen dikdasmen, kemendikbud. Sehubungan dengan itu, maka isu strategis, arah kebijakan, dan strategi LPMP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Table 5. Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sumatera Selatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Dukungan pelaku penjaminan mutu pendidikan masih belum optimal	Memperkuat sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan	Penguatan dukungan pelaku pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan
Peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan SNP	Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan	Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Peningkatan tata kelola LPMP Sumatera Selatan	Memperkuat sistem informasi pendidikan	Penguatan SDM kelembagaan, system

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	dan meningkatkan sumber daya lembaga	manajemen mutu, fasilitas lembaga serta pengelolaan sistem informasi LPMP Sumatera Selatan

Untuk melaksanakan strategi diatas diperlukan berbagai program kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat*

Sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya peningkatan mutu satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK).

2. *Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk seluruh jenjang pendidikan*

Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan (SNP). Semakin banyak sekolah yang memenuhi SNP maka indeks efektivitas sekolah semakin meningkat yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan.

Disamping itu, peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik.

3. *Peningkatan Sistem Tata Kelola Lembaga yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif*

Tantangan utama pembangunan tata kelola adalah menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan

efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola LPMP Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan secara efektif, efisien dan partisipatif.

Perincian Sasaran Strategis dan Program Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 6 Sasaran, Program dan IKK Penjaminan Mutu Pendidikan

No.	Sasaran Kegiatan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Selatan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.	Pelaku Pendidikan berperan aktif dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
			Rata-rata nilai sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan berkategori "Baik"
2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan	Peningkatan kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).	Persentase SD yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SD yang meningkat Indeks efektivitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMP yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMP yang meningkat Indeks efektivitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMA yang dipetakan

No.	Sasaran Kegiatan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMA yang meningkat Indeks efektivitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya berdasarkan SNP sebesar 100%
			Persentase SMK yang meningkat Indeks efektivitas berdasarkan SNP sebesar 95 %
			Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
			Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 80%
3	Meningkatnya Tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan	Peningkatan Sistem Tata Kelola Lembaga yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Persentase Data Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Akurat, Berkelanjutan, dan Terbaru sebesar 95%
			Tersusunnya Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan setiap

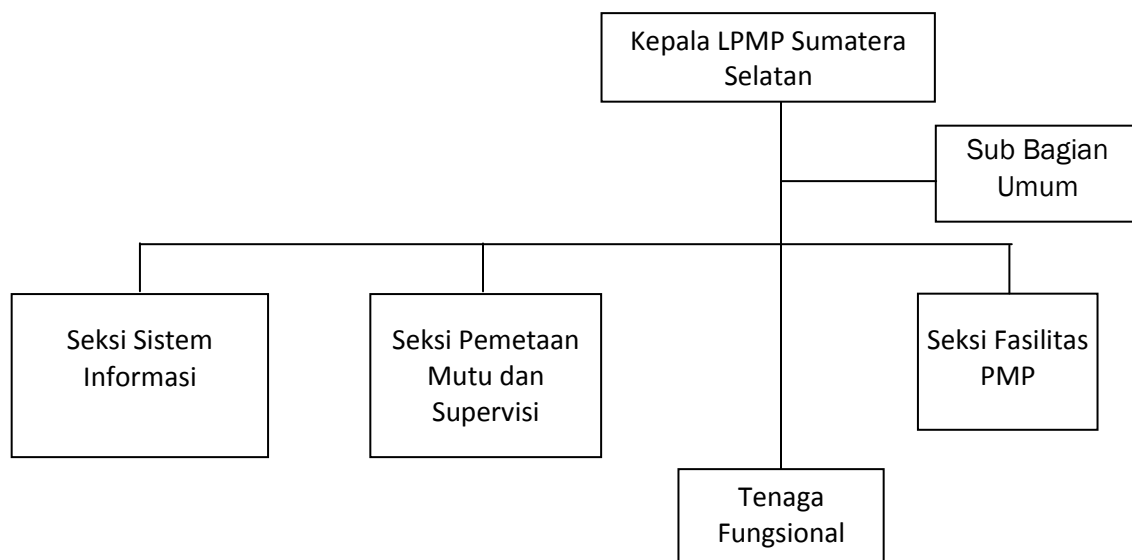
No.	Sasaran Kegiatan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			tahun 1 paket
			Nilai Minimal LAKIP LPMP Sumatera Selatan Sebesar 80 (Sangat Baik) pada Tahun 2019
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Untuk Mencapai Nilai LAKIP sebesar 100%
			Terjalinnnya kerjasama dan kemitraan dengan “stakeholders” di 17 Kab./Kota
			Terlaksananya layanan dukungan manajemen lembaga 100%
			Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi yang efektif, efisien dan akuntabel;
			Pengembangan sumber daya manusia yang professional terlaksana setiap tahun;
			Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 100% pada akhir tahun 2019
			Penyediaan sarana dan prasarana lembaga yang handal secara berkala;

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis LPMP Sumatera Selatan tahun 2015—2019 didasarkan pada regulasi pada unit utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Pada periode pembangunan 2015—2019, LPMP Sumatera Selatan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP dalam rangka mewujudkan arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis LPMP tahun 2015 - 2019. Struktur organisasi LPMP Sumatera Selatan 2015—2019 ditunjukkan pada gambar berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya system or kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Sumatera Selatan sebagai UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis kegiatan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud. Keberhasilan Sasaran Strategis Kegiatan tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Rencana Strategis LPMP Sumatera Selatan tahun 2015-2019 memuat 24 IKK yang akan dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Peningkatan Sistem Tata Kelola Lembaga yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran tujuan strategis rencana kinerja LPMP Sumatera Selatan untuk periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan peran pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
Adapun rencana kinerja untuk “*Meningkatnya sikap positif palaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*” pada 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Table 7 Target Penguatan Dukungan Penjaminan Mutu Pendidikan

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelaku Pendidikan berperan aktif dalam penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Kab/Kota	17	17	17	17	17
2	Rata-rata nilai sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan berkategori "Baik"	Skala Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

2. Peningkatan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Adapun rencana kinerja untuk "*Meningkatnya standar mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)*" pada tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase Satuan Pendidikan yang dipetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP;

Table 8 Target Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2015 - 2019

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang telah dipetakan mutunya	Persentase	90	100	100	100	100
2	SMP yang telah dipetakan mutunya	Persentase	70	100	100	100	100

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	SMA yang telah dipetakan mutunya	Persentase	70	100	100	100	100
4	SMK yang telah dipetakan mutunya	Persentase	59	65	80	90	100

- b. Meningkatkan persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP

Table 9 Target Peningkatan Indeks Efektivitas Sekolah Tahun 2015 – 2019

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	5	15	40	75	95
2	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	20	35	60	80	95
3	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	20	35	60	80	95
4	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	10	25	45	70	95

- c. Meningkatkan persentase Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi DALAM pencapaian SNP

Table 10 Target Satuan Pendidikan Yang Disupervisi dan Difasilitasi Tahun 2015 - 2019

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25	40	60	80

No.	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25	40	60	80
3	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25	40	60	80
4	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25	40	60	80

3. Peningkatan Tata Kelola LPMP Sumatera Selatan yang kuat
Adapun rencana kinerja untuk “*Meningkatnya Tata Kelola LPMP Sumatera Selatan*” pada 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Table 11 Target Tata Kelola LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kualitas Data Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan yang akurat dan terbaru;	%	85	87	89	92	95
2	Penyusunan Profil Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Nilai Minimal LAKIP LPMP Sumatera Selatan Sebesar 80 (Sangat Baik) pada Tahun 2019	Skor	72	73	75	78	80
4	Kerjasama dan kemitraan	Bulan	12	12	12	12	12

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	dengan “ <i>stakeholders</i> ” di Provinsi Sumatera Selatan						
5	Layanan dukungan manajemen lembaga	Bulan	12	12	12	12	12
6	Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian kegiatan dan pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel;	Bulan	12	12	12	12	12
7	Koordinasi dengan unit utama dan pemerintah daerah	Bulan	12	12	12	12	12
8	Pengembangan sumber daya manusia yang professional;	%	100	100	100	100	100
9	Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;	%	-	-	50	100	100
10	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga yang handal secara berkala;	Paket	2	2	5	2	3

B. Kerangka Pendanaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 mengacu kepada struktur organisasi dengan formulasi kegiatan dan penganggaran.

Pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah didukung oleh 6 (enam) satuan kerja pusat, 34 satuan kerja Dekonsentrasi pada tingkat provinsi, dan 33 LPMP sebagai unit pelaksana teknis.

Adapun pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang didukung oleh LPMP pada kurun lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. *Core Programme*, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
2. *Extended Programme*, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan dengan LPMP, antara lain pelatihan Kurikulum 2013, Pendampingan dan monev, dan sekolah model.
3. *Pengembangan Kapasitas*, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, seperti mengkaji ulang kebutuhan sarana dan prasarana lembaga disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) pengembangan kompetensi SDM dengan melakukan pemetaan kompetensi pegawai, peningkatan kompetensi, pembinaan karir dan lain sebagainya, 3) penyediaan data mutu pendidikan dasar dan menengah yang akurat, akuntabel dan terbarukan, 4) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi, dan 5) penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Program-program Ditjen Dikdasmen tersebut wajib direalisasikan oleh LPMP Sumatera Selatan sebagai UPT Kemdikbud sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan pengalokasian anggaran pada LPMP Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Sumatera Selatan tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pembangunan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam program dan kegiatan tahunan bidang pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019. Mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tema pembangunan pendidikan dalam lima tahunan ini adalah meningkatkan daya saing regional, dengan tetap mencari peluang merambah daya saing internasional, yang dilakukan antara lain dengan keikutsertaan peserta didik dalam kompetisi-kompetisi internasional yang bergengsi.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja program dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sumatera Selatan pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional program pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan pembinaan penjaminan mutu pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

Kegiatan ini disertai dengan penetapan anggarannya dan tanggung jawab pengelolaannya. Seluruh kegiatan LPMP Sumatera Selatan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan. tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan juga harus ditingkatkan.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis menjadi indikasi acuan atau keterukuran keberhasilan kinerja. Tantangan tetap ada, seperti kualitas sumber

daya manusia, percepatan gerak dinamika daerah yang kerap tidak kondusif untuk mendukung pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi tersebut harus disikapi dengan fleksibel dan bijaksana supaya tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dapat terus disempurnakan. Komitmennya adalah apa yang menjadi IKK harus dicapai secara konsisten dan bertanggungjawab.

LAMPIRAN A

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN (IKP/IKK) LPMP SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015 - 2019

Kode	Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
SK 1	Meningkatnya peran pelaku penjaminan mutu pendidikan						
1	Pelaku Pendidikan berperan aktif dalam peningkatan mutu satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Kab./Kota	17	17	17	17	17
2	Rata-rata nilai sikap positif pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berkategori "Baik"	Skala Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SK 2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan						
1	SD yang telah dipetakan mutunya	Persentase	90,15	100,0	100,0	100,0	100,0
2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	5,0	15,0	40,0	75,0	95,0
3	SMP yang telah dipetakan mutunya	Persentase	71,49	100,0	100,0	100,0	100,0
4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	20,0	35,0	60,0	80,0	95,0
5	SMA yang telah dipetakan mutunya	Persentase	71,41	100,0	100,0	100,0	100,0
6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	20,0	35,0	60,0	80,0	95,0
7	SMK yang telah dipetakan mutunya	Persentase	59,60	65,0	80,0	90,0	100,0
8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	Persentase	15,0	25,0	45,0	70,0	95,0
9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0

Kode	Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Persentase	16,8	25,0	40,0	60,0	80,0
SK 3	Meningkatnya tata kelola LPMP yang baik						
1	Kualitas Data Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Setatan yang akurat dan terbaru	Persentase	85	87	89	92	95
2	Penyusunan Profil Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Setatan	Buku	1	1	1	1	1
3	Nilai Minimal LAKIP LPMP Sumatera Selatan Sebesar 80 (Sangat Baik) pada Tahun 2019	Skor	72	73	75	78	80
4	Kerjasama dan kemitraan dengan "stakeholders" di Provinsi Sumatera Selatan	Bulan	12	12	12	12	12
5	Layanan dukungan manajemen lembaga	Bulan	12	12	12	12	12
6	Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian kegiatan dan pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel	Bulan	12	12	12	12	12
7	Koordinasi dengan unit utama dan pemerintah daerah	Bulan	12	12	12	12	12
8	Pengembangan sumber daya manusia yang profesional	Persentase	100	100	100	100	100
9	Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Persentase	0	0	50	100	100
10	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga yang handal secara berkala	Paket	2	2	5	2	3